

Aset 218 Miliar Selamat

PUDAKPAYUNG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah telah menyelamatkan aset negara sebanyak Rp 218 miliar lebih. Penyelamatan aset tersebut dilakukan BPK Perwakilan Jateng selama kurun waktu 2009-2014 dengan jumlah 337 pemeriksaan.

Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Cris Kuntadi mengatakan, jumlah tersebut merupakan nilai yang dipulihkan atau disetor berdasarkan rekomendasi yang telah selesai. Ia tak menampik selama ini BPK juga mengalami kendala dalam melaksanakan tugasnya, terutama kesadaran pemerintah daerah dalam menyelamatkan asetnya sendiri.

Dari temuan pemeriksaan total Rp 850 Miliar, terdapat kerugian negara hingga Rp 187 Miliar dengan jumlah pemeriksaan 839. Sementara, potensi kerugian negara dari 58 pemeriksaan mencapai Rp 21 miliar, dan kekurangan penerimaan pada 494 pemeriksaan mencapai Rp 173 miliar.

"Hal yang lain seperti K3 (ketidakhematan, ketidakefektifan, dan ketidakefisienan) mencapai Rp 468 Miliar dengan

580 pemeriksaan. Dari nilai yang dipulihkan, sisa kerugian negara, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, masih dalam proses sesuai dengan rekomendasi BPK," ungkap Cris di sela *workshop* bersama media Jateng di kantor BPK RI Jalan Perintis Kemerdekaan, Kamis (9/10).

■ Pemeriksa

Meski telah mengklaim menyelamatkan aset negara, lanjut Cris, BPK tak menampik masih banyak pemda yang tak sadar diri melindungi asetnya. Ironisnya, BPK seolah menjadi pihak yang membutuhkan aset tersebut padahal BPK memiliki fungsi sebagai pemeriksa.

"Misal ada proyek pembangunan yang molor dari waktu yang ditentukan. Seharusnya Pemda dengan tegas memberlakukan denda kepada petugas



Foto: Fitria Rahmawati.

Cris Kuntadi.

pembuat komitmen (PPK). Namun seolah BPK ini yang butuh, padahal itu aset daerah yang nilainya juga tidak kecil," ungkapnya.

Saking hati-hatinya penyelenggara negara, jelas Cris, BPK malah diminta menjadi salah satu wadah saran dan konsultasi oeh pemerintah. Sesuai dengan aturan, konsultasi mengenai masalah keuangan adalah wewenang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ■

M9-rth